

A. Buku

- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan ke 2, Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta.
- A.A Andi Prajitno, 2013, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Selaras, Malang.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Erwiningsih, Winahyu dan Sailan Zaili Fakhriyasa, 2019, *Hukum Agraria Dasar-Dasar dan Penerapannya di Bidang Pertanahan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Hadi, Sutrisno, 1998, *Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya*, Liberty, Yogyakarta.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta.
- Hutagalung, Aries S, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Hunnex, Milton D, 2004, *Peta Filsafat Pendekatan Kronologis dan Tematis (judul asli: Chronological and Thematic Charts of Philosophies and Philosophers)*, Cetakan Pertama, Teraju, Jakarta.
- HS, Salim, 2011, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- HS, Salim, 2019, *Peraturan Jabatan dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustofa, 2014, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, KaryaMedia, Yogyakarta.
- Parlindungan, A.P 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Roeckelein, Jon E, 2013, *Kamus Psikologi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Santoso, Urip, 2019, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Prenadanmedia Group, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, UGM, Yogyakarta.

Suriasumantri, Jujun S, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cetakan ke-18, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Syamsudin M, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Walgio Bimo, 2005, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi, Yogyakarta.

Wibawanti, Erna Sri & R. Muriyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.

Wignyosubroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Huma, Jakarta.

Yunisa, Nanda, 2017, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta, Jakarta.

Zakiah, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No 59 dan Tambahan Lembaran Republik Indonesia No 3696).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.

Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis/Disertasi) dan Artikel Jurnal

Aditama, Purnama Noor, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli, *Lex Renaissance*, Jurnal, Volume 3, Nomor 1, 2018.

Adjie. Habib, *Telaah Ulang : Kewenangan PPAT Untuk Membuat Akta*, bukan mengisi blanko/Formulir Akta, *Renvoi*, Jurnal Nomor 3.44.IV, Januari, 2007.

Cristiani, Weny Arimbi, 2018, "Persepsi Notaris Terhadap Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta per hari di Kota Bengkulu", *Thesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

I Gusti Bagus Yoga Prawira, 2016, Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah, Magister Kenotariatan Universitas Mataram, Mataram.

Maria S.W, Sumardjono, 1993, "Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA", *Majalah Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, No.18/X/93, Yogyakarta.

Noviantara, Yan Ade Putra Joko, 2019, Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Terhadap Kebenaran Materiil ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *Thesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Puspitasari, Bernadetta 2021, "Analisis Yuridis Jual Beli Hak Pakai Atas Tanah Negara (Studi Kasus Akta Jual Beli Nomor 71/2018 Yang Diterbitkan Oleh PPAT Bernisial S Di Kabupaten Sleman)", *Thesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yoan, Ricki dkk, "Tanggung Jawab Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Setelah Tidak Menjabat Lagi Terhadap Akta Yang Dibuatnya", *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 6 Nomor 2, November 2017.

Wibowo, Mardian, 2016, "Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.

Wahyono, Eko Budi, "*Banjir. Ombak, Tanah Musnah dan Geodesi*", *Opini, Majalah Sandi*, Edisi 27, 2008.